

Pudarnya Ideologi Partai

● RIDHO AL-HAMDI

Sekretaris Kelas Internasional Ilmu Pemerintahan (IGOV), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ambang batas (*threshold*) dalam pemilihan legislatif dapat terbagi menjadi dua model, yakni ambang batas formal dan ambang batas efektif. Model pertama diterapkan sebagai syarat partai memiliki kursi di parlemen.

Jika partai tidak memenuhi batas minimal, partai tersebut secara otomatis tidak memiliki kursi di parlemen. Model kedua diterapkan sejak partai bertarung dalam meraih suara di daerah pemilihan (*dapil*).

Meski partai hanya mendapatkan satu kursi, dia tetap berhak memiliki kursi di parlemen. Namun, jika partai itu tidak memenuhi syarat minimal pembentukan fraksi, dia wajib bergabung dengan fraksi yang sudah ada atau membentuk fraksi baru dari gabungan partai yang ada.

Sejak pasca-Orde Baru, Indonesia pernah menerapkan kedua jenis ambang batas ini. Ambang batas efektif diterapkan pada Pemilu 1999 dan 2004.

Pada dua pemilu ini, sejumlah partai kecil tetap memiliki kursi di parlemen meskipun hanya satu, seperti PBB, PK, PNU, PDKB, PPDI, PNIM, PKPB, PKPI, PPKD, PDI, dan PDR dengan catatan mereka harus membentuk atau bergabung dengan fraksi yang ada.

Sementara itu, ambang batas formal diterapkan sejak Pemilu 2009 hingga kini sehingga partai-partai kecil tersebut tidak lagi memiliki kursi di parlemen. Tentu kedua model ini memiliki kelebihan dan kelemahan.

Pemberlakuan ambang batas formal sejak 2009, mengakibatkan sejumlah partai politik harus mencari strategi efektif agar tetap lolos menuju Senayan. Apalagi, dari pemilu ke pemilu ambang batas selalu naik: 2,5 persen pada 2009, 3,5 persen pada 2014, dan 4 persen pada 2019.

Walhasil, berbagai cara dilakukan partai dan calegnya agar nasib mereka selamat. Mendukung capres pejawat adalah salah satu cara partai agar memperoleh *coattail effect* dari calon yang mereka dukung.

Tentu dengan asumsi bahwa pejawat memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan semudah mungkin, baik sumber daya

manusia maupun infrastruktur di berbagai sektor.

Sejumlah partai mengajak artis menjadi caleg yang berfungsi sebagai pengumpul suara (*vote getter*) sehingga elektabilitas partai semakin meningkat. Nasdem, PDIP, dan PKB tercatat sebagai partai yang banyak merekrut artis sebagai caleg mereka.

Pertimbangan partai memilih artis pun tidak lagi berdasarkan pada alasan ideologis karena tentu artis bukanlah kader murni partai dan mayoritas artis baru bergabung ke partai menjelang pemilu. Transaksi jelas: partai butuh suara dan artis bisa mewujudkan hal tersebut meskipun mereka tidak menang.

Sejumlah partai baru pun merapat ke koalisi pemerintah. Padahal, filosofi kelahiran partai baru adalah kekecewaan terhadap rezim yang berkuasa sehingga melalui partai baru tersebut diharapkan, mereka menawarkan gagasan alternatif.

Realitas berbeda, pragmatisme dan kekuasaan menjadi tujuan partai-partai baru di Indonesia. Realitas politik yang demikian menunjukkan bahwa ideologi politik di Indonesia semakin memudar.

Apalagi, diperkuat dengan fenomena "presidentialized parties" atau personalisasi partai politik di mana kekuatan personal melampaui aturan dan mekanisme partai.

Hampir mayoritas keputusan partai politik di Indonesia lebih ditentukan pada sosok elite tertentu ketimbang berdasarkan pada prosedur dan mekanisme yang berlaku. Kita tidak bisa menolak bahwa PDIP di bawah kendali Megawati, Demokrat tidak bisa lepas dari pribadi SBY, dan Gerindra melekat pada sosok Prabowo.

Begitu juga, partai-partai lain, seperti PAN dan Amien Rais, PKB dan Muhaemin Iskandar, Hanura dan Wiranto, Nasdem dan Surya Paloh, serta Perindo dan Hary Tanoe.

Penelitian penulis dalam satu tahun terakhir tentang ambang batas pemilu menunjukkan, peta pertarungan antarpolitical politik dalam merespons isu ambang batas (baik parlemen maupun presiden) tidak lagi didasarkan pada pertimbangan ideologis.

Jika pertimbangan ideologis, seharusnya partai-partai kecil menolak angka empat persen ambang batas parlemen karena hal tersebut sangat memberatkan posisi mereka untuk lolos ke Senayan. Begitu juga, dalam konteks ambang batas presiden.

Meskipun beberapa partai menolak ide itu, *toh* mereka tetap bersama koalisi pejawat yang sangat getol mempertahankan ambang batas presiden. Partai politik akhirnya lebih memilih jalur pragmatis dan meninggalkan pertimbangan ideologis demi eksistensi mereka.

Pilihannya hanya satu: jika tidak lolos ambang batas, mereka terlempar dari parlemen. Jika terlempar dari parlemen, sulit bagi mereka meraih target berikutnya, yaitu *bargaining* dengan partai pemenang untuk posisi menteri.

Jika sudah terlempar dari Senayan dan tidak ada jatah menteri, eksistensi partai semakin terancam dari radar pencatatan politik berikutnya. Karena itulah, *vote-seeker* (pejuang suara) menjadi ciri mutakhir kepartaian di Indonesia.

Carilah suara sebanyak-banyaknya karena hanya dengan itulah eksistensi partai diakui, baik di parlemen maupun pemerintahan. Kenyataan politik yang demikian merupakan akibat dari sistem pemilihan Indonesia yang menggunakan model *open list proportional representation* sejak 2009, pilpres secara langsung sejak 2004, dan pilkada secara langsung sejak 2006.

Tiga model pemilu seperti inilah yang mengakibatkan tidak mapannya sistem kelembagaan partai politik. Para caleg yang bertarung di *dapil*, seakan berjuang dengan modal mereka sendiri sehingga mereka tidak memiliki loyalitas penuh terhadap partai.

Alasannya sederhana, mereka menang karena perjuangan sendiri. Bahkan, caleg di internal partai saling konflik satu sama lain di *dapil* yang sama. Akankah sistem kepartaian di Indonesia akan seperti ini terus?

Apakah sistem pemilu yang berlaku saat ini baik untuk nasib kepartaian dan demokrasi Indonesia? Apakah efisiensi pemilu serentak yang diperjuangkan para aktivis pro-demokrasi baik untuk sistem ketatanegaraan Indonesia?

Kiranya kita perlu menyadari, pemilu langsung tidak berbanding lurus dengan baiknya demokrasi. Sejumlah negara Eropa tidak menggunakan model pilpres ataupun pilkada langsung, tetapi kondisi mereka tetap makmur dan sejahtera. Lihat saja Jerman dan Inggris. Karena itu, kita jangan terlena dengan demokrasi prosedural tanpa berpijak pada substansinya. ■